



KINERJA PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU

REGIONAL REVENUE PERFORMANCE OF BAUBAU CITY

La Ode Kamaluddin Mursidi*

Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Kota Baubau

Dikirim: 13 Maret 2019; Disetujui: 6 Juni 2019; Diterbitkan: 31 Juli 2019

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah, serta implikasi pertumbuhan realisasi anggaran dan rasio kontribusi terhadap rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Baubau. Dengan menggunakan data panel laporan realisasi anggaran Kota Baubau Tahun 2011-2017, penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio dan statistik regresi linear berganda dalam mengukur kinerja pendapatan daerah, serta implikasi pertumbuhan realisasi anggaran dan rasio kontribusi terhadap rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Baubau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata varians anggaran mencapai -Rp. 813.064.377,43, dengan rasio derajat desentralisasi fiskal yang masih sangat kurang yakni hanya mencapai 7,45% yang mengakibatkan nilai rasio ketergantungan keuangan menjadi sangat tinggi yakni sebesar 89,77%, dengan nilai rasio kemandirian yang rendah sekali, hanya mencapai 8,11%. Di sisi lain, rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah memenuhi kriteria sangat efektif dengan capaian nilai 119,86%, dana perimbangan sebesar 72,63% dengan kriteria tidak efektif, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan capaian efektivitas sebesar 102,79%. Bukti penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan nilai rasio efektivitas pendapatan daerah dipengaruhi oleh variabel *growth* anggaran (X1), *growth* realisasi (X2), dan rasio kontribusi (X3). Namun secara parsial, ketiga variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Baubau.

Kata Kunci: Anggaran, Kinerja, Pendapatan, Realisasi.

Abstract

This study aims to determine the performance of regional income, as well as the implication of the growth in budget realization and the ratio of contributions to the ratio of the effectiveness of regional income in Baubau City. Using panel data of the Baubau city budget realization report for 2011-2017, this study uses ratio analysis techniques and multiple linear regression statistics to measure the performance, as well as the implications of growth in budget realization and the ratio of contributions to the ratio of Baubau City's regional income, as well as the implications of growth in budget realization and the ratio contributions to the ratio of Baubau City's regional income effectiveness. The results of this study indicate that the average value of the budget variance reaches -Rp. 813.064.377,43, with a very low degree of fiscal decentralization ratio that only reached 7.45% which resulted in a very high value of the financial dependency ratio of 89,77%, with a very low value of independence ratio of 89,77% with a very low value of independence ratio, only reaching 8,11%. On the other hand, the effectiveness ratio of local revenue management fulfills very effective criteria with an achievement value of 119,86%, a balance fund of 72.63% with an ineffectiveness achievement of 102.79%. The evidence of this study shows that the value of the ratio of effectiveness of regional income is influenced simultaneously by the variable budget growth (X1), growth realization (X2), and contribution ratio (X3). But partially, the three independent variables have no effect on the effectiveness ratio of regional income in Baubau City.

Keywords: *Budget, Performance, Revenue, Realization.*

I. PENDAHULUAN

Saat ini aspek kinerja keuangan pemerintah menjadi isu utama dalam studi akuntansi keuangan daerah. Dengan mengacu dari berbagai persoalan yang ada, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi salah satu fokus utama dalam menilai produktivitas birokrasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang menitikberatkan pada konsep *value for money*. Demikian juga derasnya arus informasi dan tingginya pelbagai asumsi masyarakat terkait dengan implementasi regulasi di era otonomi daerah, turut mendorong pemerintah daerah untuk fokus dalam peningkatan pelayanan publik menuju *good governance*. Upaya tersebut seiring dengan perhatian terhadap penilaian praktik akuntansi dan manajemen pemerintah, mulai dari perbaikan sistem akuntansi manajemen dan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan hingga implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah menjadi bagian dari fokus perhatian studi bagi kalangan akademisi, dan wacana di tengah masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Di saat yang sama, tuntutan peningkatan kinerja birokrasi dalam pengelolaan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih menjadi pertanyaan bagi kalangan publik, khususnya praktisi dan akademisi.

Dalam konteks kinerja, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme *reward* dan *punishment*. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Inti pengukuran kinerja pemerintah adalah pengukuran *value for money* yang diukur dari sisi *input*, *output*, dan *outcome*, yang tujuan pengukurannya yakni mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber

daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya (Mardiasmo, 2009, p. 139).

Berkaitan dengan hal tersebut, urgensi penilaian kinerja terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus menunjukkan kinerja yang baik dengan tujuan untuk melakukan penilaian secara internal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif dalam mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Konteks tersebut cukup beralasan mengingat dalam implementasinya terjadi ambiguitas hasil dari analisis kinerja yang menegaskan bahwa meskipun indikator penilaian rasio kemandirian dan efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki efek negatif terhadap pengangguran (Astuti, 2015, p. 14). Sebaliknya, hasil penelitian Linawati dan Suhardi (2017, p. 26) membuktikan bahwa rasio efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu implementasi anggaran tidak hanya digunakan sebatas alat perencanaan dan pengendalian, namun juga sebagai saran dan prasarana aparatur pemerintah terkait dengan komitmen sebagai pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik dengan tetap mengacu pada partisipasi anggaran yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial, komitmen organisasi dan motivasi aparatur birokrasi (Giusti et al., 2018, p. 128). Di samping itu, sistem pengendalian, desentralisasi dan gaya kepemimpinan juga terbukti mampu memperkuat pengaruh partisipasi anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah (Yanida et al., 2013, p. 399).

Kinerja pemerintah daerah sebagai alat manajemen digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*) dengan elemen kunci yang mencakup: (1) perencanaan dan penetapan tujuan; (2) pengembangan ukuran yang relevan; (3) pelaporan formal atas hasil; dan (4) penggunaan informasi. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja

yakni: (1) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi; (2) menyediakan sarana pembelajaran pegawai; (3) memperbaiki kinerja periode berikutnya; (4) memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*; (5) memotivasi pegawai; dan (6) menciptakan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2005, p. 14).

Bukti penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan pengawasan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, aspek akuntabilitas juga memegang faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah (Putra, 2018, p. 186). Secara kontekstual, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward and punishment* (Gaspersz, 2011; Mardiasmo, 2009; Verasvera, 2016).

Dalam rangka memenuhi aspek kinerja pemerintah, penyusunan APBD menjadi hal penting dalam konteks kebijakan. APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Bastian, 2006, p. 189). APBD diharapkan mampu memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; dan memenuhi fungsi utama anggaran untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; serta menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan (Haryanto et al., 2007, pp. 26-27). Untuk memenuhi tujuan tersebut, beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain yakni:

- (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Disebutkan bahwa fungsi APBD di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menetapkan bahwa: (a) anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik; (b) anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan; (c) anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum; (d) anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah; (e) hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk itu APBD sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

Dalam konteks pengelolaannya, APBD menjadi alat yang esensial untuk

menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian guna menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan *misappropriation*. Di sisi lain, APBD digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemberoran (Haryanto et al., 2007, p. 69). Dalam rangka memenuhi unsur kinerja pemerintah dalam konteks anggaran tersebut, APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan (Haryanto et al., 2007, p. 77).

Idealnya, APBD bisa menjadi salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu mencapai target dan sasaran makro ekonomi daerah dalam mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Untuk itu, kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan, di antaranya di bidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yakni dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber penerimaan yang baru (Wenny, 2012, p. 42).

Struktur APBD yang memuat unsur pendapatan daerah kini menjadi fokus perhatian akademisi. Terlebih lagi wacana dan urgensi tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur wujud desentralisasi fiskal, maupun tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat yang sangat erat kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah di era otonomi saat ini. Pendapatan Daerah merupakan pendapatan yang dianggarkan dalam APBD yang meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, dan menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri atas Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli yang sah. Sementara itu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Khusus ditegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan Daerah menjadi objek penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Melalui laporan realisasi kinerja, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja Pemerintah daerahnya dalam merealisasikan program dan kegiatan yang berkenaan dengan target Pendapatan Daerah. Laporan Realisasi Anggaran sebagai format dalam laporan kinerja menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi kepada

para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding, di mana penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi yang sama, laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomis yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif, dan memastikan informasi anggaran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan jumlah anggaran dan memenuhi unsur efisiensi, efektivitas, dan hemat dalam pengelolaannya, serta turut memastikan bahwa informasi anggaran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darise, 2008, p. 97).

Melalui Laporan Realisasi Anggaran, analisis Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan cara: (1) analisis varians (selisih) anggaran pendapatan; (2) menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pajak daerah, pertumbuhan retribusi daerah, dan pertumbuhan pendapatan transfer (3) menghitung rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas PAD; (4) menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan melalui potensi pajak daerah, dan potensi retribusi daerah (Mahmudi, 2010, p. 136).

Dalam rangka mengevaluasi struktur Pendapatan Daerah yang tercermin dalam laporan Realisasi Anggaran, Rasio keuangan tersebut di atas menjadi salah satu tolok ukur kinerja pendapatan daerah yang dijadikan fokus penelitian bidang kajian akuntansi dan keuangan daerah saat ini, mengingat berbagai

penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam konteks APBD yang di tinjau berdasarkan rasio keuangan Pendapatan Daerah telah banyak dilakukan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur APBD, dominasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan atau dana transfer pemerintah pusat ke daerah masih sangat signifikan jika dibandingkan dengan sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah. Hal ini memberi gambaran bahwa tingkat desentralisasi fiskal, maupun kemandirian dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi permasalahan tersendiri di balik tuntutan produktivitas, akuntabilitas dan transparansi birokrasi dalam memaksimalkan kinerja pengelolaan APBD.

Hasil penelitian Nugraha (2017) di Kabupaten Kulonprogo menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi nilai rasio kemandirian selama tahun anggaran 2007-2011 yang tidak signifikan yakni 7,98% (2007); 7,83% (2008); 7,06% (2009); 8,25% (2010); 7,28% (2011). Hasil ini menunjukkan bahwa pola kemandirian keuangan masih tergolong "rendah sekali". Capaian Rasio rata-rata derajat disentralisasi fiskal dalam kurun waktu 5 tahun hanya mencapai 7,13% dalam kategori "sangat kurang".

Penelitian Linawati dan Suhardi (2017) di Provinsi Bengkulu menemukan bahwa rasio Derajat Otonomi Fiskal Daerah di Tahun 2002-Tahun 2006 masih menunjukkan nilai rata-rata relatif rendah yakni hanya berkisar 25,91% yang menunjukkan bahwa dukungan keuangan dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi yaitu sebesar 74,09%, dengan realisasi PAD sangat efektif sebesar 111,79%, dan nilai rata-rata realisasi APBD juga sangat efektif yakni sebesar 102,75%. Bahkan dari hasil penelitian Pilat dan Morasa (2017) pada Pemerintah Kota Manado juga menyimpulkan efektifnya pengelolaan APBD yang tidak sejalan dengan rasio keuangan, di mana nilai Rasio Kemandirian Keuangan selama 5 tahun yang masih sangat rendah, yakni 20,877%. Demikian juga rasio derajat desentralisasi fiskal yang hanya mencapai angka 17,240%. Senada dengan itu, hasil penelitian Rahmawati dan Putra (2016) di Kabupaten Sumbawa menunjukkan proporsi rata-rata pendapatan

daerah dari tahun 2010-2012 hanya sebesar 7,75% untuk PAD, Dana perimbangan 78,77% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 13,47%, dengan tingkat kemandirian keuangan yang rendah mencapai sebesar 7,75%. Di samping itu, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 sebesar 87,32% dalam kategori kurang efektif.

Fakta-fakta tersebut di atas semakin menguatkan bahwa ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah masih sangat kecil. Baihaqi (2012) menunjukkan rasio PAD yang sangat rendah dan rasio transfer yang sangat tinggi di Tahun 2009-Tahun 2011. Bukti penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun ada korelasi nilai PAD terhadap kemandirian keuangan daerah, akan tetapi tidak terjadi korelasi antara Investasi Daerah dengan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Demikian pula, hasil penelitian Wenny (2012) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, penelitian ini merepresentasikan kinerja keuangan berdasarkan rasio pertumbuhan, efektivitas, kontribusi, serta rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah Kota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah Kota Baubau, serta implikasi pertumbuhan realisasi anggaran dan kontribusi terhadap efektivitas pendapatan daerah Kota Baubau Tahun 2011-2017.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Baubau. Populasi data meliputi seluruh laporan realisasi anggaran pendapatan daerah dengan jumlah sampel data penelitian yang terdiri atas 60 item pendapatan daerah di Tahun 2011-2017. Penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio keuangan dan statistik regresi linear berganda dalam mengukur kinerja dan implikasinya terhadap efektivitas kinerja pendapatan daerah. Adapun variabel yang digunakan yakni meliputi varians anggaran pendapatan, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, dan rasio efektivitas PAD dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Analisis pertumbuhan pendapatan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}}$$

- (2) Derajat desentralisasi, dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Dengan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal (%) yakni sebagai berikut: Sangat Kurang (0,00 - 10,00); Kurang (10,01 - 20,00); Sedang (20,01 - 30,00); Cukup (30,01 - 40,00); Baik (40,01 - 50,00); Sangat Baik (> 50,00).

- (3) Rasio ketergantungan keuangan daerah, dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Dengan Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah (%), sebagai berikut: Sangat Rendah (0,00 - 10,00); Rendah (10,01 - 20,00); Sedang (20,01 - 30,00); Cukup (30,01 - 40,00); Baik (40,01 - 50,00); Sangat Tinggi (> 50,00).

- (4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman

Dengan kriteria penilaian rasio kemandirian tingkat kemampuan daerah, yakni sebagai berikut: Rendah Sekali (0% - 25%); Rendah (25% - 50%); Sedang (50% - 75%); Tinggi (75% - 100%).

- (5) Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD

Dengan kriteria penilaian rasio efektivitas PAD sebagai berikut: Sangat efektif (> 100%); Efektif (100%); Cukup Efektif (90%-99%); Kurang Efektif (75%-89%); Tidak Efektif (<75%).

Di samping menggunakan analisis rasio keuangan, untuk menguji implikasi pertumbuhan (*growth*) realisasi anggaran dan kontribusi terhadap efektivitas pendapatan daerah Kota Baubau Tahun 2011-2017, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni regresi linear berganda dengan persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$, di mana Y = rasio efektivitas pendapatan daerah; a = Konstanta; b_1, b_2, b_3 = Koefisien Variabel X_1 , X_2 dan X_3 ; X_1 (*growth* anggaran); X_2 (*growth*

realisasi); X_3 (Kontribusi). Pengujian atas semua variabel tersebut dilakukan baik secara simultan (Statistik uji F) maupun secara parsial (Statistik uji t) dengan masing-masing tingkat signifikansi sebesar $t < 0,05$.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perspektif analisis varians, struktur realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Baubau dalam periode 2011-2017 menunjukkan fluktuasi nilai di tiap tahunnya. Adapun capaian kinerja selama tujuh tahun tersebut menunjukkan rata-rata capaian sebesar 99,88%, dengan capaian tertinggi struktur pendapatan daerah terjadi di tahun 2013 sebesar 102,82% dengan total anggaran yang dikelola yakni sebesar Rp 622.024.420.520,00, dan nilai realisasi yang mencapai angka Rp 639.547.739.622,00. Hasil ini menunjukkan bahwa varians realisasi atas anggaran di Tahun 2013 merupakan capaian tertinggi selama periode 2011-2017 dengan nilai varians positif sebesar Rp 17.523.319.102,00. Sementara itu capaian realisasi terendah terjadi di Tahun 2016 yakni 97,59% dengan nilai anggaran dan realisasi, serta variansnya masing-masing sebesar Rp 761.448.111.650,00; Rp 743.098.999.890,00; dan Rp -18.349.111.760,00. Hasil perhitungan varians pendapatan daerah Kota Baubau Tahun 2011-2011 digambarkan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, tren kenaikan anggaran yang terjadi dalam kurun waktu 2015-2017 tidak disertai dengan capaian realisasi di tahun tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian kinerja dengan tren positif berdasarkan analisis varians yakni terjadi di Tahun 2012 (100,58%); Tahun 2013 (102,82%); dan Tahun 2014 (102,56%). Sementara itu varians negatif atas pengelolaan anggaran masing-masing terjadi di Tahun 2011; 2015 sampai 2017 dengan nilai varians rata-rata yang mencapai -Rp. 813.064.377,43. Meskipun hasil dari nilai rata-rata varians menunjukkan arah negatif, analisis dari perspektif rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Baubau menunjukkan progres yang positif di tiap tahunnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata rasio desentralisasi fiskal tersebut yakni sebesar 7,45%, dengan rasio tertinggi terjadi di tahun 2017 yang mencapai sebesar 12,85%, meningkat dari

Tabel 1.

Varians Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2011-2017

Tahun	Varians Pendapatan Daerah			%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian (%)	
2011	490.621.950.537,00	488.779.832.716,38	-1.842.117.820,62	99,62
2012	525.419.756.002,00	528.459.737.773,40	3.039.981.771,40	100,58
2013	622.024.420.520,00	639.547.739.622,00	17.523.319.102,00	102,82
2014	678.670.713.656,00	696.059.676.821,62	17.388.963.165,62	102,56
2015	815.307.708.015,00	801.908.117.627,00	-13.399.590.388,00	98,36
2016	761.448.111.650,00	743.098.999.890,00	-18.349.111.760,00	97,59
2017	837.011.569.551,20	826.958.674.838,77	-10.052.894.712,43	98,80
Rata-Rata	675.786.318.561,60	674.973.254.184,17	-813.064.377,43	99,88

Sumber: BPKAD Kota Baubau, 2018 (data diolah)

tahun sebelumnya di Tahun 2016 yang hanya mencapai 7,17%. Secara umum, selama periode 2011-2017 rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan progres yang positif yang sebelumnya hanya berkisar di angka 4,51% di Tahun 2011 sebagaimana dimuat dalam Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa proporsi terbesar nilai rasio derajat desentralisasi berasal dari sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah (3,24%), disusul pajak daerah (1,96%), retribusi daerah (1,75%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (0,50%). Dari perolehan nilai rasio di Tahun 2011 sampai Tahun 2016, kriteria penilaian

yang diraih Pemerintah Kota Baubau dalam mewujudkan desentralisasi fiskal masih sangat kurang. Hal ini disebabkan minimnya kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah, di mana dominasi sumber penerimaan dalam struktur APBD masih berasal dari dana perimbangan/transfer. Sementara itu di Tahun 2017 rasio desentralisasinya menunjukkan perubahan positif mencapai 12,85% dengan menyandang kriteria "kurang". Dengan hasil analisis rata-rata rasio desentralisasi fiskal yang hanya mencapai angka 7,45% selama Tahun 2011-2017, hal ini dapat dikatakan bahwa besarnya ketergantungan keuangan Kota Baubau terhadap Pemerintah Pusat menjadi

Tabel 2.

Rasio Derajat Desentralisasi Kota Baubau Tahun 2011-2017

Pendapatan Asli Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pajak Daerah	1,07	1,19	1,30	1,65	1,67	2,47	4,37	1,96
Retribusi Daerah	2,15	2,16	2,42	3,90	0,44	0,62	0,58	1,75
Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,44	0,64	0,48	0,39	0,29	0,62	0,63	0,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,85	0,97	1,32	1,97	4,77	5,52	7,26	3,24
Total	4,51	4,97	5,53	7,90	7,17	9,23	12,85	7,45

Sumber: BPKAD Kota Baubau, 2018 (data diolah)

Tabel 3.
Rasio Ketergantungan Keuangan Kota Baubau Tahun 2011-2017

Dana Perimbangan	Rasio Ketergantungan Keuangan (%)							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Bagi Hasil Pajak	4,47	4,68	3,07	1,90	1,41	2,05	1,28	2,69
Bagi Hasil Bukan Pajak	0,72	1,58	1,68	1,53	1,49	0,59	0,32	1,13
Dana Alokasi Umum	65,00	70,14	66,85	65,12	60,48	65,94	61,55	65,01
Dana Alokasi Khusus	5,05	6,56	5,67	5,82	18,05	10,12	20,41	10,24
Dana Transfer Lainnya	20,26	11,71	17,10	15,15	10,63	0,00	0,00	10,69
Total	95,49	94,66	94,38	89,52	92,07	78,70	83,55	89,77

Sumber: BPKAD Kota Baubau, 2018 (data diolah)

pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki regulasi dan kinerja untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Disamping capaian nilai rasio desentralisasi tersebut, hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Baubau menyentuh angka rata-rata rasio sebesar 89,77% dengan kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat maupun provinsi. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingginya dana alokasi umum yang diterima pemerintah Kota Baubau yang mencapai angka rata-rata sebesar 65,01%. Informasi mengenai rasio ketergantungan keuangan Kota Baubau Tahun 2011-2017 dijelaskan dalam Tabel 3.

Tabel 3 merepresentasikan kondisi ketergantungan keuangan tertinggi yakni sebesar 95,49% (Th. 2011) dan rasio terendah

78,70% (Th 2016). Hasil ini membuktikan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Baubau dari Tahun 2011- tahun 2017 berada dalam kriteria rasio yang sangat tinggi, dengan proporsi nilai bagi hasil pajak dan bukan pajak yang masih sangat rendah dengan capaian masing-masing hanya sebesar 2,69% dan 1,13%, jika dibanding dengan struktur dana perimbangan yang bersumber dari DAU, DAK, maupun dana transfer lainnya yang nilai proporsinya mencapai 65,01% untuk DAU, dan 10,24% DAK, serta 10,69% yang bersumber dari dana transfer lainnya.

Di samping analisis varians, rasio desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan Kota Baubau, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio untuk kemandirian keuangan Kota Baubau Tahun 2011-2017 berada dalam kriteria rasio

Tabel 4.
Rasio Kemandirian Keuangan Kota Baubau Tahun 2011-2017

Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan (%)							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pajak Daerah	1,12	1,25	1,38	1,74	1,80	2,73	5,02	2,15
Retribusi Daerah	2,25	2,28	2,57	4,11	0,47	0,68	0,67	1,86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,46	0,68	0,51	0,41	0,31	0,68	0,73	0,54
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,89	1,03	1,40	2,08	5,14	6,08	8,33	3,56
Total	4,72	5,23	5,85	8,33	7,73	10,16	14,74	8,11

Sumber: BPKAD Kota Baubau, 2018 (data diolah)

kemandirian yang rendah sekali, yakni hanya mencapai 8,11%. Nilai tersebut terafiliasi dari hasil pajak daerah yang hanya mencapai 2,15%, retribusi daerah 1,86%, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah dengan nilai rasio masing-masing yang hanya mencapai 0,54% dan 3,56%. Gambaran hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Kota Baubau dideskripsikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4, penelitian ini membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan Kota Baubau menunjukkan progres positif dari Tahun 2011-2017. Rasio tertinggi yakni 14,74% di Tahun 2017, meningkat 10,02% dari capaian rasio di Tahun 2011. Kondisi yang sama juga ditunjukkan dari proporsi nilai rasio pajak daerah yang mencapai 5,02%, hasil pengelolaan kekayaan daerah 0,73%, dan lain-lain PAD yang sah 8,33% di Tahun 2017 yang mengalami peningkatan sejak Tahun 2011. Berbeda dengan hasil tersebut, retribusi daerah Kota Baubau Tahun 2011-2017 menunjukkan kecenderungan penurunan nilai yang terjadi

di Tahun 2015-2017. Capaian nilai tertinggi proporsi nilai rasio retribusi daerah hanya mencapai angka 4,11% di Tahun 2014, dan terendah 0,47% terjadi di Tahun 2015. Hasil ini membuktikan bahwa secara umum rata-rata rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah memenuhi kriteria sangat efektif yakni mencapai 119,86%. Kriteria yang sama juga dicapai Pemerintah Kota Baubau pada Tahun 2011-2017 dengan nilai rasio di atas 100%. Rasio tertinggi mencapai 135,02% di Tahun 2013, dan terendah yakni 100,99% di Tahun 2011.

Di samping nilai rasio efektivitas PAD, Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio efektivitas dana perimbangan tahun 2011-2017 mencapai 72,63% dengan kriteria tidak efektif. Sementara itu, angka rata-rata rasio efektivitas dari lain-lain pendapatan daerah sangat efektif yang mencapai angka 102,79%. Dari presentasi hasil yang dipaparkan tersebut membuktikan bahwa secara kumulatif rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Baubau Tahun 2011-

Tabel 5.
Rasio Efektivitas Kota Baubau Tahun 2011-2017

Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas (%)							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pajak Daerah	111,80	152,62	139,01	113,47	125,49	122,54	202,05	138,14
Retribusi Daerah	100,47	66,14	98,32	110,31	85,09	99,62	96,84	93,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	104,96	98,69	98,40	101,00	87,65	100,00	100,00	98,67
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86,72	278,22	204,36	135,89	118,76	115,64	102,00	148,80
Pendapatan Asli Daerah	100,99	148,92	135,02	115,17	104,25	109,45	125,22	119,86
Bagi Hasil Pajak	103,49	99,16	113,00	103,66	77,58	123,48	52,48	96,12
Bagi Hasil Bukan Pajak	190,69	176,71	147,53	92,30	83,26	93,16	79,18	123,26
Dana Alokasi Umum	88,42	100,00	100,00	100,00	100,00	106,09	100,00	99,22
Dana Alokasi Khusus	49,97	100,00	100,00	100,00	100,00	43,26	92,32	83,65
Dana Transfer Lainnya	344,77	98,79	105,00	110,17	84,21	0,00	0,00	106,13
Dana Perimbangan/Transfer	155,47	114,93	113,11	101,23	89,01	73,20	64,80	72,63
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	172,75	172,51	206,27	107,52	182,92	85,45	132,49
Total Pendapatan Daerah	99,62	371,69	102,82	102,56	98,36	97,59	98,80	138,78

Sumber: BPKAD Kota Baubau, 2018 (data diolah)

Tabel 6.
Nilai Korelasi Antar Variabel

		Correlations			
		Efektivitas	GrowthAng	GrowthReal	Kontribusi
Pearson Correlation	Efektivitas	1,000	,332	,363	-,083
	GrowthAng	,332	1,000	,986	-,043
	GrowthReal	,363	,986	1,000	-,036
	Kontribusi	-,083	-,043	-,036	1,000
Sig. (1-tailed)			,005	,002	,263
		Efektivitas	,005	-,000	,371
		GrowthAng	,002	,000	-,391
		GrowthReal	,263	,371	,391
N		Efektivitas	60	60	60
		GrowthAng	60	60	60
		GrowthReal	60	60	60
		Kontribusi	60	60	60

2017 memenuhi kriteria sangat efektif dengan tingkat rasio efektivitas mencapai 138,78%.

Berdasarkan hasil analisis Pearson *correlation* dari 60 item pendapatan daerah Kota Baubau Tahun 2011-2017 menunjukkan nilai korelasi positif yang lemah antara *growth* anggaran (X1) dan *growth* realisasi (X2) terhadap nilai rasio efektivitas (Y), yakni dengan nilai korelasi *growth* anggaran (X1) sebesar 0,332, dan *growth* realisasi (X2) sebesar 0,363 yang berarti bahwa semakin tinggi *growth* anggaran dan *growth* realisasi, maka semakin tinggi nilai rasio efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah Kota Baubau. Sementara itu, hasil yang berbeda dari korelasi antara variabel kontribusi (X3) dengan rasio efektivitas (Y) yang menunjukkan arah korelasi negatif yang kuat sebesar -,083 yang

berarti bahwa semakin tinggi rasio kontribusi pendapatan daerah (X3), maka semakin rendah nilai rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Baubau. Tabel 6 dan 7 merupakan *output* nilai korelasi antar variabel dan nilai koefisien determinasi variabel penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai koefisien determinasi *R square* hanya mencapai 0,163 atau 16,3% variasi dari variabel dependen rasio efektivitas pendapatan daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (*growth* anggaran, *growth* realisasi, dan rasio kontribusi pendapatan daerah), sedangkan sisanya 83,7% dijelaskan oleh variasi atau faktor lain. Secara simultan hasil uji ANOVA atau *F test* dengan nilai *F* hitung sebesar 3,634, probabilitas 0,018. Karena nilai probabilitas yang dicapai lebih kecil dari <0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel *growth* anggaran, *growth* realisasi, dan rasio kontribusi secara simultan berpengaruh terhadap rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Baubau. Tabel 8 dan 9 merupakan hasil statistik Uji *F* dan Uji *t* yang dicapai dalam penelitian ini.

Dari ketiga variabel independen (*growth* anggaran, *growth* realisasi, dan rasio kontribusi) yang dimasukkan ke dalam model regresi, ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,193 (X1), 079 (X2)

Tabel 7.
Nilai Koefisien Determinasi

Model Summaryb				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,404a	,163	,118	42,36786
a. Predictors: (Constant), Kontribusi, GrowthReal, GrowthAng				
b. Dependent Variable: Efektivitas				

Tabel 8.
Hasil Statistik Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19571,620	3	6523,873	3,634	,018b
	Residual	100521,968	56	1795,035		
	Total	120093,588	59			

a. Dependent Variable: Efektivitas

b. Predictors: (Constant), Kontribusi, GrowthReal, GrowthAng

Tabel 9.
Hasil Statistik Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	109,786	6,320		17,371	,000
	GrowthAng	-,115	,087	-,967	-,317	,193
	GrowthReal	,125	,070	1,314	1,790	,079
	Kontribusi	-,183	,289	-,078	-,634	,529

a. Dependent Variable: Efektivitas

dan 0,52 (X3) > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *growth* anggaran, *growth* realisasi dan rasio kontribusi tidak berpengaruh terhadap rasio efektivitas pendapatan daerah. Nilai nilai *Unstandardized beta Coefficients* menunjukkan persamaan regresi pengaruh/implikasi *growth* anggaran dan realisasi, serta rasio kontribusi terhadap rasio efektivitas pendapatan daerah dalam penelitian ini yakni:

$$Y = 109.786 + (-0.115)X_1 + (0.125)X_2 + (-0.183)X_3$$

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan adanya varians negatif pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kota Baubau Tahun 2011-2017 dengan nilai rata-rata varians sebesar Rp. 813.064.377,43. Kriteria rata-rata rasio desentralisasi fiskal yang dicapai sangat kurang, hanya berkisar 7,45% dengan rasio tertinggi mencapai 12,85% (2017). Di sudut

lain, nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Baubau mencapai rata-rata rasio sebesar 89,77% dengan kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat maupun provinsi yang ditandai dengan tingginya dana alokasi umum yang diterima pemerintah Kota Baubau yang mencapai angka rata-rata sebesar 65,01%, dengan rasio ketergantungan keuangan tertinggi yakni sebesar 95,49% di Tahun 2011 dan rasio terendah 78,70% di Tahun 2016. Sementara itu, nilai rata-rata rasio untuk kemandirian keuangan Kota Baubau Tahun 2011-2017 berada dalam kriteria rasio kemandirian yang rendah sekali, yakni hanya mencapai 8,11%, dengan fluktuasi nilai rasio positif dari Tahun 2011-2017 dengan capaian rasio tertinggi yakni 14,74% di Tahun 2017. Sebaliknya tingkat rasio efektivitas pendapatan daerah secara totalitas mencapai angka 138,78% yang memenuhi kriteria penilaian rasio yang sangat efektif,

dan secara implikatif capaian rasio efektivitas pendapatan daerah tersebut secara simultan dipengaruhi oleh *growth* anggaran, *growth* realisasi, dan rasio kontribusi. Sebaliknya, secara parsial, penelitian ini membuktikan bahwa ketiga variabel independen *growth* anggaran, *growth* realisasi, dan rasio kontribusi tidak berpengaruh terhadap rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Baubau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dari kesimpulan hasil riset ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan jajaran Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Baubau atas kerja samanya, baik dari segi dana maupun data yang menunjang proses penelitian ini.

V. REFERENSI

- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, 6(1), 1-18.
- Baihaqi. (2012). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kemandirian Daerah Pada Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Fairness*, 2(1), 1-14.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Gaspersz, V. (2011). *Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard dengan Malcolm Baldrige dan Lean Six Sigma Supply Chain Management Contoh Implementasi Pada Organisasi Bisnis dan Pemerintah*. Bogor: Vinchriso Publication.
- Giusti, G., Kustono, A. S., & Effendi, R. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi dan Motivasi Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 121. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i2.8646>
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Linawati, & Suhardi. (2017). Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Moderasi Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Ekuivalensi*, 3(2), 19-28.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugraha, P. C. (2017). Analisa Index Perhitungan Ratio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Periode Tahun 2007 Sampai Dengan 2011. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 5(1), 94-108.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. , Pub. L. No. 12 (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. , Pub. L. No. 71 (2010).
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 6(1), 45-56. <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Putra, W. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(2), 181-187. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143>
- Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 1767-1795.
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137-162. Retrieved from <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7430>
- Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Forum Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(1), 39-51. Retrieved from <http://eprints.mdp.ac.id/id/eprint/676>
- Yanida, M., Sudarma, M., & Rahman, A. F. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 389-401.